



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 2 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI yang dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Selasa, 2 September 2025, Pukul 13.33 – 13.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Teo Reffelsen
2. Mulya Sarmono

B. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Faisal Rachman | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 5. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 6. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 7. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 8. Turyawan Ardi | (Kementerian Lingkungan Hidup) |
| 9. Yanti Epiphantias | (Kementerian Lingkungan Hidup) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:41]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 100/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir melalui online, Perkara 100.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [01:08]

Ya, terima kasih, Ketua Majelis.

Yang hadir pada hari ini, ada saya sendiri, Teo Reffelsen dan rekan saya itu Mulya Sarmono.

Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Baik, dari DPR tidak hadir.

Dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir dari Kantor Menkoperkenomian, saya sendiri, Elen Setiadi (Deputi Bidang SDM Kemenko Perkenomian). Kemudian, Pak Ktut (Kepala Biro Hukum). Kemudian, Faisal Rachman (Staf).

Kemudian, dari Kementerian Lingkungan Hidup, kami laporkan yang hadir, Pak Turyawan Ardi (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama) dan Bu Yanti Epiphantias (Analisis Hukum).

Dan dari Kementerian Hukum, yang hadir Bu Kanti Mulyani (Plt. Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Peraturan Perundang-undangan). Kemudian, Rahadhi Aji (Perancang Peraturan Perundang-undangan). Henri Us ... Unesdo dan Marina Dyah Puspitasari sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dan keterangan dari DPR. Tapi berdasarkan surat yang masuk di bagian persidangan atau Kepaniteraan, DPR tidak hadir dan kemudian dari Pemohon juga belum siap dengan keterangan ahlinya atau menghadirkan ahli.

Bagaimana ini, Pemohon, betul?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [02:37]

Ya, benar, Yang Mulia.

Karena ada bentrokan jadwal, kemudian ahlinya belum bisa menghadiri persidangan pada hari ini. Nah, untuk itu, selain menyampaikan permohonan maaf, kami juga ingin memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Para Majelis, untuk menjadwalkan ulang pemberian keterangan dari ahli Pemohon.

Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:06]

Baik. Kami dari Majelis sudah menentukan untuk penundaan di hari Kamis, tanggal 11 September 2025, pukul 10.30. Kemudian (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [03:23]

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

Ya, sekaligus kami akan panggil kembali untuk DPR supaya hadir pada persidangan tersebut, agendanya untuk memberikan keterangan atau ... keterangan dari DPR.

Begitu, ya, Pemohon?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [03:38]

Ya, Majelis. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Baik, terima kasih. Dan itu untuk Kuasa dari Presiden, penjadwalan ulang yang dimohonkan oleh Pemohon dan ketidakadiran dari DPR. Oleh karena itu, mohon dapat dipahami dan kami jadwalkan sidang ulang ... sidang penundaan sebagaimana yang disampaikan tadi.

Oleh karena itu, pada persidangan yang akan ... yang akan datang, supaya hadir tanpa dipanggil lagi, termasuk Pemohon juga. Kalau DPR akan kami panggil melalui surat kembali.

Demikian. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.36 WIB

Jakarta, 2 September 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

